BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Waris adalah bagian dari suatu hukum perdata yang secara luas didalamnya termasuk dalam ruang lingkup hukum keluarga.¹ Hukum waris berkaitan erat dengan kehidupan manusia sejak zaman dulu sampai saat ini, hal tersebut dikarenakan setiap individu pada akhirnya akan menghadapi suatu peristiwa hukum yang disebut kematian. Adanya peristiwa hukum tersebut yang pada akhirnya akan menimbulkan adanya berbagai konsekuensi hukum, misalnya yaitu terkait dengan suatu pengelolaan serta kelangsungan hak serta kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia tersebut.

Menurut pakar hukum Indonesia, Wirjono Prodjodikoro hukum waris yaitu suatu hukum yang berisi suatu aturan terkait kedudukan suatu harta peninggalan manusia setelah seorang manusia meninggal dunia (pewaris), serta bagaimana tatacara perpindahan suatu harta tersebut kepada orang lain yang dalam hal ini biasa disebut ahli waris.² Proses kewarisan biasanya mencakup penentuan orang yang nantinya berhak mendapatkan warisan, pembagian suatu aset harta warisan, dan pengelolaan aset tersebut untuk memastikan manfaatnya dapat dinikmati oleh seluruh pihak yang berkaitan dengan suatu proses kewarisan itu sendiri.

Disuatu sisi yang lain kewarisan tidak hanya sebatas pada pengalihan suatu harta benda antara pewaris dengan ahli waris, akan tetapi juga terkait

¹ Eman Suparman, *Hukum Waris Islam Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2007), 27.

² Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan Islam Di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 2006), 13.

nilai-nilai moral, tradisi, serta tanggung jawab sosial. Dalam proses kewarisan berpindahnya harta seseorang kepada orang lain terdapat tiga hal pokok yang harus diperhatikan, yaitu adanya pewaris, ahli waris dan harta warisan.³ Pewaris merupakan seseorang yang memiliki harta yang nantinya akan dipindahkan, ahli waris merupakan orang yang berhak menerima harta warisan. Sedangkan harta warisan merupakan suatu harta peninggalan dari pewaris yang kemudian diwarisi oleh ahli warisnya. Suatu harta warisan bisa berupa harta kekayaan atau suatu benda material, misalnya yaitu rumah, tanah, kendaraan, dan juga immaterial yaitu berupa hak dan kewajiban, misalnya hak bagi hasil, hak gadai dan sebagainya.⁴

Hal yang berkaitan dengan hukum pembagian warisan pada umumnya secara rinci telah diatur hal-hal yang terkait dengan proses pendistribusian harta warisan. Mulai dari ditetapkannya pihak-pihak yang nantinya berhak menjadi ahli waris, bagian masing-masing harta yang akan didapatkan oleh ahli waris, bagaimana ketentuan pembagiannya, serta aturan-aturan lain terkait proses pembagian harta warisan. Dalam proses pembagian harta warisan asas keadilan merupakan hal utama yang diperhatikan. Dengan adanya keadilan dalam pembagian harta waris maka akan menciptakan suatu keselarasan, kerukunan serta kedamaian yang terdapat dalam sebuah keluarga.

Hukum waris yang diberlakukan oleh masyarakat Indonesia hingga sekarang bersifat Pluralistis, artinya terdapat beberapa sistem hukum yang digunakan dalam suatu pembagian harta warisan oleh masyarakat. Masyarakat

³ Naskur, "Pembagian Harta Warisan Disaat Pewaris Masih Hidup Telaah Pasal 187 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam", Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, Vol.15, No.1, 2017, 42.

⁴ Supangat, "Hak Paten (Immaterial) Sebagai Harta Waris", Jurnal Islmadina, Vol.XIV, No.1, 2015, 114.

umumnya menggunakan hukum waris dalam kitab Undang-undang hukum Perdata, hukum Islam ataupun hukum adat. Keberagaman dalam suatu proses pembagian warisan ini disebabkan karena keragaman suku bangsa di Indonesia, yang masing-masing memiliki adat serta suatu sistem hukum adat dengan karakteristik tersendiri pada masing-masing wilayah. Dengan adanya perbedaan tersebut masyarakat diberikan kebebasan untuk menentukan sistem hukum apa yang dianggap paling sesuai dengan pembagian harta warisan, sehingga menunjukkan suatu rasa keadilan bagi masyarakat itu sendiri.⁵

Dalam praktiknya ketiga sistem hukum tersebut pada dasarnya telah berjalan secara berdampingan dilakukan oleh masyarakat Indonesia sampai saat ini berdasarkan latar belakang agama, budaya serta suatu kesepakatan antar ahli waris. Di Indonesia terdapat salah satu dari ketiga sistem hukum tersebut yang sangat menarik untuk dilakukan pemahaman khusus dalam suatu sistem hukum kewarisan yaitu pada hukum Islam. Hukum Islam merupakan suatu aturan yang bersumber dari wahyu Allah SWT dan juga sunnah Rosulullah SAW, yang mengatur seluruh aspek kehidupan umat Islam, baik bersifat ibadah maupun muamalah.⁶

Hukum Islam tidak hanya terbatas pada tata cara beribadah, akan tetapi juga mencakup berbagai hubungan sosial, ekonomi, politik, dan juga hukum keluarga. Hukum Islam bersifat komprehensif dan bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Hukum Islam dibentuk berdasarkan suatu prinsip keadilan, kasih sayang dan keseimbangan antara hak maupun suatu kewajiban serta menjunjung tinggi

⁵ Aziz Abdul, "Dinamika Pemberian Harta Waris Lebih Banyak Kepada Anak Bungsu Di Jakarta Timur", Jurnal An Nawawi, Vol.4, No.1, 2014, 31.

⁶ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2003), 12.

nilai-nilai kemanusiaan. Dalam pelaksanaannya, hukum Islam bersumber dari Al-Qur'an sebagai sumber utama, disusul dengan Hadis Nabi, ijma' dan qiyas.

Al-Qur'an memberikan dasar-dasar umum hukum, sementara Hadis dan sumber lainnya berfungsi sebagai penjelas dan perinci dari ketentuan-ketentuan yang bersifat global.⁷ Oleh karena itu, dalam memahami dan menerapkan hukum Islam, penting untuk merujuk pada semua sumber tersebut secara menyeluruh, agar tidak terjadi penyimpangan atau pengabaian terhadap prinsip-prinsip syariat. Salah satu aspek paling penting yang diatur dalam hukum Islam adalah terkait hukum kewarisan. Hukum waris Islam memiliki posisi yang sangat penting mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah pemeluk agama Islam.

Hukum waris dalam Islam pada dasarnya bukan sekedar suatu norma sosial maupun suatu adat istiadat, melainkan suatu bagian dari hukum Syar'i yang bersumber langsung dari Al-Qur'an. Warisan dalam Islam merupakan suatu bentuk distribusi kekayaan yang telah diatur secara ketat oleh syariat. Hukum warisan bukanlah suatu hasil keputusan dari manusia, melainkan bersumber langsung dari wahyu Allah yaitu Al-Qur'an.

Oleh karena itu pelaksanaannya bukan hanya semata-mata urusan sosial, tetapi bagian dari pelaksanaan hukum Allah yang wajib untuk ditaati oleh seluruh umat muslim. Dalam konteks ini hukum Islam yang akan dijadikan sebagai dasar rujukan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu Al-Qur'an, yang menjadi suatu pedoman hidup utama yang mengatur terkait hak serta kewajiban setiap individu termasuk halnya yaitu terkait pewarisan.

⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 1*, (Jakarta: Kencana, 2007), 45.

Dalam proses pembagian waris, keadilan harus diterapkan baik kepada laki-laki ataupun perempuan. Keadilan sendiri berarti keseimbangan antara hak serta kewajiban. Inti hukum waris Islam adalah pemindahan harta peninggalan dari pewaris kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan yang telah Allah tetapkan. Jadi adil tidak harus selalu dikatakan sebagai sesuatu yang sama rata melainkan proporsional atau disebut *al-mizan*, yakni sesuai antara hak, kewajiban yang dimiliki setiap individu secara seimbang.

Oleh karena itu, suatu pemahaman masyarakat terhadap hukum kewarisan Islam menjadi hal yang sangat penting. Pembagian warisan dapat dilakukan dengan baik jika ahli waris memahami aturan tersebut secara menyeluruh. Hal ini secara langsung menuntut ahli waris muslim memahami hukum Islam untuk mengetahui pentingnya sistem pembagian harta warisan dalam Islam.

Prinsip dasar hukum waris Islam terdapat dalam Al-Qur'an, khususnya dalam Surah An-Nisa ayat 11, 12, dan 176, yang menetapkan pihak yang berhak menerima warisan, proporsi pembagian harta, dan ketentuan-ketentuan lain. Dalam hukum waris Islam, pembagian harta mengutamakan suatu asas keadilan proporsional, dimana ahli waris laki-laki biasanya mendapatkan dua bagian dibandingkan ahli waris perempuan. Pembagian tersebut bukan bentuk diskriminasi, melainkan berdasarkan tanggung jawab finansial yang lebih banyak yang diemban oleh seorang anak laki-laki dalam suatu keluarga.

Misalnya dalam potongan ayat Al-Qur'an yang terdapat dalam surah An-Nisa ayat 11 yang berbunyi :⁸

⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Musaf Al-Qur'an, 2019), 77.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ...

Artinya : “Allah mensyari’atkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan).”

Didalam ayat tersebut telah dijelaskan terkait ketentuan pembagian harta waris dalam Islam yaitu, bagian antara anak laki-laki dan perempuan yaitu 2:1 (dua banding satu). Dimana anak laki-laki mendapatkan lebih banyak dari pada anak perempuan. Hal tersebut dikarenakan anak laki-laki mempunyai suatu tanggung jawab yaitu nafkah bagi keluarganya. Salah satu keunggulan hukum waris Islam seperti dalam Al-Qur’an ini yaitu kejelasan aturan terkait ahli waris yang berhak serta besaran harta, sehingga dapat meminimalkan potensi konflik di antara keluarga.

Penerapan hukum waris sesuai syariat Islam sangat penting untuk mencegah terjadinya sengketa warisan yang sering terjadi dalam masyarakat. Ketika prinsip-prinsip hukum waris tidak dipatuhi baik karena ketidaktahuan, pengaruh budaya lokal, atau kepentingan pribadi maka potensi konflik antar ahli waris menjadi besar. Oleh karena itu, pemahaman yang benar mengenai hukum waris dalam Islam menjadi kebutuhan yang mendesak, terutama di tengah masyarakat yang masih mencampurkan antara aturan agama dan kebiasaan turun-temurun.

Namun, implementasi hukum waris Islam di masyarakat juga tidak selalu berjalan dengan secara optimal. Banyak keluarga muslim yang belum sepenuhnya memahami serta menerapkan pembagian harta warisan sesuai

dengan syariat. Hal itu seperti yang terjadi masyarakat Dusun Ngesong, Desa Manyaran Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Pembagian harta warisan di wilayah masyarakat tersebut dilakukan saat pewaris sudah meninggal dunia dan umumnya dilakukan ketika acara tahlilan sudah selesai sampai tahlilan malam ke 1000. Pembagian harta warisan umumnya dilakukan secara musyawarah dimana seluruh ahli waris berkumpul dalam pelaksanaan pembagian harta warisan.⁹

Pemilihan Dusun Ngesong sebagai lokasi penelitian didasarkan pada adanya fenomena yang cukup menarik dan relevan dengan tema yang diangkat, yaitu kasus seorang anak bungsu yang menuntut bagian waris lebih besar dari ahli waris lainnya, dengan berbagai alasan yang melatarbelakangi tuntutan tersebut, dimana tuntutan yang diberikan terkait bagian harta warisan tersebut yang tidak sesuai dengan aturan yang telah ditentukan di dalam Al-Qur'an.

Kasus ini menjadi penting untuk dikaji karena menunjukkan adanya perbedaan antara praktik pembagian warisan di masyarakat dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Dusun Ngesong memiliki karakteristik masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai kekeluargaan dan pertimbangan emosional dalam mengambil keputusan, termasuk dalam hal pembagian harta warisan.¹⁰

Melihat fenomena yang terjadi di masyarakat, khususnya yang terjadi pada masyarakat di wilayah Dusun Ngesong, yang terdapat suatu praktik pembagian warisan yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan syariat

⁹ Observasi peneliti, terkait proses pembagian harta warisan (Dusun Ngesong) 10 Januari 2025.

¹⁰ Observasi Peneliti, terkait kondisi masyarakat Dusun Ngesong 10 Januari 2025

Islam. Seorang anak bungsu dalam keluarga tersebut menuntut bagian harta warisan yang lebih banyak dengan alasan telah berjasa lebih besar dalam merawat orang tua hingga akhir hayat.

Tuntutan tersebut yang kemudian menimbulkan akibat seperti kerenggangan hubungan antar ahli waris lainnya karena dianggap tidak sejalan dengan prinsip keadilan. Padahal pembagian harta warisan dalam hukum waris Islam telah mengatur secara rinci bagian masing-masing ahli waris tanpa membedakan latar belakang, urutan kelahiran, atau jasa pribadi terhadap pewaris. Kasus seperti ini yang mencerminkan adanya suatu kesenjangan antara pemahaman masyarakat tentang hukum waris Islam dengan pelaksanaannya di lapangan.

Banyak di antara masyarakat yang masih mengedepankan suatu pertimbangan subjektif dan emosional dibandingkan berpegang pada hukum yang bersifat pasti sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an, khususnya dalam Surah An-Nisa ayat 11, 12 dan 176. Ketidaksesuaian antara praktik dan ketentuan hukum ini menjadi persoalan tidak hanya berdampak pada aspek hukum, akan tetapi juga menimbulkan konflik internal dalam keluarga, hingga muncul pemasalahan-permasalahan lain yang menimbulkan suatu perselisihan antar ahli waris, serta bisa memunculkan masalah baru yaitu penundaan pembagian harta warisan.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti merasa perlu untuk mengkaji lebih dalam mengenai permasalahan ini dari sudut pandang hukum Islam. Dengan harapan dapat memberikan suatu gambaran yang jelas mengenai bagaimana hukum Islam memandang terkait tuntutan yang dilakukan oleh anak bungsu

untuk mendapatkan bagian harta warisan yang lebih banyak.

Oleh karena itu, peneliti mengangkat tema ini ke dalam karya tulis ilmiah dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam terhadap Sikap Anak Bungsu Menuntut Bagian Harta Waris Lebih Banyak (Studi Kasus Dusun Ngesong, Desa Manyaran, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri)”**. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mengungkap suatu permasalahan secara faktual yang terjadi di masyarakat, akan tetapi juga sebagai upaya untuk memberikan pemahaman hukum yang sesuai dengan Al-Qur’an dan ajaran Islam, sehingga masyarakat dapat menerapkan pembagian harta warisan secara adil dan benar sesuai dengan tuntunan agama Islam.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah alasan yang melatarbelakangi anak bungsu di Dusun Ngesong, Desa Manyaran, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri menuntut bagian harta waris lebih banyak?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sikap anak bungsu yang menuntut bagian harta waris lebih banyak di Dusun Ngesong, Desa Manyaran, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui alasan yang melatarbelakangi sikap anak bungsu menuntut pembagian harta waris lebih banyak di Dusun Ngesong, Desa Manyaran, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri.
2. Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap sikap anak bungsu yang menuntut bagian harta waris lebih banyak di Dusun Ngesong, Desa Manyaran, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi dalam berkembangnya kajian Islam, terkhusus di bidang hukum waris. Penelitian ini dapat berfungsi untuk memverifikasi teori-teori atau ketentuan hukum waris Islam yang sudah ada, apakah masih relevan dan mampu menjawab persoalan-persoalan yang terjadi dalam masyarakat terutama dalam kasus tuntutan anak bungsu yang meminta bagian harta waris lebih besar.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi masyarakat, guna mengetahui proses pembagian warisan yang selaras ajaran Islam, sehingga mampu menjadi pedoman dalam pembagian harta waris serta mewujudkan terciptanya suatu kedamaian, ketentraman dan kesejahteraan ahli waris. Pemahaman yang didapatkan juga dapat mengurangi perpecahan hubungan suatu keluarga yang timbul akibat pembagian harta warisan yang tidak sesuai hukum Islam.

b. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan dapat menjadi referensi tambahan serta sumber informasi untuk penelitian selanjutnya terkait proses pembagian harta warisan yang benar terkhusus selaras dengan hukum Islam demi mewujudkan terciptanya suatu kedamaian, ketentraman serta kesejahteraan para ahli waris dalam menjalankan praktik pembagian harta warisan.

E. Penelitian Terdahulu

1. Muhammad Wildan Hafidz Islamil (UIN Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024).

Dalam skripsinya yang berjudul *Praktik Bagi Waris Anak Bungsu Dalam Sistem Pembagian Harta Warisan Masyarakat Desa Karangpule Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen Perspektif Urf*. Dalam Penelitian tersebut berfokus bagaimana analisis pembagian harta waris yang dilakukan oleh masyarakat Desa Karangpule Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen Perspektif Urf. Letak persamaan penelitian yang dilakukan oleh Wildan dengan penelitian yang sedang diteliti yaitu terkait pembagian harta warisan dimana anak bungsu mendapatkan bagian yang lebih besar dengan pendekatan kualitatif penelitian lapangan.

Sedangkan perbedaanya yaitu apabila dalam penelitian yang dilakukan oleh Wildan anak bungsu mendapatkan bagian warisan lebih banyak karena kesepakatan antar pewaris dan ahli waris serta berfokus pada analisis yang dilakukannya yaitu menggunakan pendekatan Urf sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti saat ini yaitu menganalisis bagaimana tinjauan hukum Islam terkait suatu tuntutan yang dari anak bungsu yang meminta bagian harta waris lebih besar kepada ahli waris lain yang menyebabkan anak bungsu mendapatkan suatu bagian harta waris yang lebih banyak dimana ada beberapa ahli waris yang tidak setuju dengan pembagian harta warisan tersebut.¹¹

¹¹ Muhammad Wildan Hafidz Islamil, “*Praktik Bagi Waris Anak Bungsu Dalam Sistem Pembagian Harta Warisan Masyarakat Desa Karangpule Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen Perspektif Urf*”, *Skripsi*, (Universitas Islam Negeri Prof.K.H Saifuddin Zuhri, 2024).

2. Hafith Masfuri, (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2024)

Dalam Skripsinya yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Anak Prabon Dalam Pembagian Waris Kekeluargaan”*, Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik serta penyebab yang melatarbelakangi anak prabon mendapatkan jumlah bagian harta warisan yang lebih banyak. Letak persamaan penelitian ini dengan penelitian yang diteliti yaitu pada jenis penelitian yang dilakukan yaitu penelitian lapangan, serta suatu proses pembagian harta waris dimana salah satu ahli waris mendapatkan bagian yang lebih besar.

Sedangkan letak perbedaannya yaitu dimana dalam penelitian yang ditulis oleh Hafith Masfuri yaitu alasan serta tinjauan hukum Islam yang telah melatarbelakangi anak prabon mendapatkan suatu bagian harta warisan lebih banyak berupa rumah induk yaitu karena sudah suatu tradisi yang dilakukan oleh masyarakat setempat, sedangkan dalam penelitian ini yaitu tinjauan hukum Islam terhadap proses pembagian harta warisan dimana seorang anak bungsu mendapatkan bagian harta yang lebih banyak dikarenakan suatu tuntutan yang dilakukan kepada ahli waris lain.

3. Firda Muzayanah (UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023),

Dalam skripsinya yang berjudul *Pembagian Warisan Lebih Banyak Kepada Sebagian Anak Pewaris di Desa Gejlig Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan*. Dalam penelitian ini lebih berfokus terhadap bagaimana proses pembagian harta warisan di desa tersebut serta alasan yang menyebabkannya. Kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang

dilakukan sama-sama mengangkat persoalan ketimpangan dalam praktik pembagian harta waris di masyarakat, dengan menggunakan pendekatan empiris, yaitu dengan menggali langsung peristiwa yang terjadi di lapangan dan menelusuri alasan di balik pemberian bagian warisan yang lebih besar kepada salah satu ahli waris. Kedua penelitian ini berupaya memberikan analisis terhadap praktik sosial yang tidak sepenuhnya selaras dengan sistem hukum formal yang berlaku.

Namun, terdapat perbedaan, dimana skripsi yang dilakukan oleh peneliti saat ini secara khusus memfokuskan pada suatu sikap yang dilakukan oleh anak bungsu yang menuntut atas suatu bagian warisan untuk mendapatkan bagian lebih banyak, serta menganalisis dari perspektif hukum Islam yang bersumber pada Al-Qur'an. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Firda lebih umum, menyoroti suatu pembagian harta warisan yang tidak merata kepada sebagian anak tanpa membatasi pada suatu posisi seperti anak bungsu, dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum serta budaya lokal sebagai dasar analisis.¹²

4. Yulia Maulidyanti (UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2022)

Dalam Skripsinya yang berjudul "*Pembagian Warisan Lebih Besar Untuk Anak Sulung di Kelurahan Sragi, Kabupaten Pekalongan*". Penelitian ini mengkaji bagaimana praktik pembagian harta warisan yang memberikan bagian lebih besar kepada anak sulung yang dipengaruhi pada suatu nilai-nilai budaya Jawa. Kesamaan dengan skripsi yang akan diteliti karena sama-sama mengangkat isu pembagian harta warisan yang

¹² Firda Muzayanah, "*Pembagian Warisan Lebih Banyak Kepada Sebagian Anak Pewaris Di Desa Gejig Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan*", Skripsi, (UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023).

tidak sesuai dengan ketentuan normatif dalam hukum Islam.

Kedua penelitian ini menyoroti adanya kecenderungan dalam masyarakat untuk memberikan bagian lebih besar kepada salah satu anak, dengan alasan yang dianggap wajar oleh lingkungan sosial, dengan menggunakan pendekatan empiris untuk menggali fakta langsung yang terjadi di lapangan dan menghubungkannya pada tinjauan hukum Islam. Namun demikian, Perbedaan utama terletak pada fokus objek kajiannya. Skripsi yang ditulis Yulia meneliti tentang anak sulung yang mendapatkan bagian warisan lebih besar karena dianggap memikul tanggung jawab keluarga, sedangkan skripsi Anda menyoroti sikap anak bungsu yang menuntut bagian lebih besar, yang justru menunjukkan sikap aktif dari pihak anak.¹³

5. Andi Nur Fadini Putri, (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta).

Dalam Skripsinya yang berjudul *“Praktik Pembagian Waris Masyarakat Suku Bugis Kabupaten Sidrap terhadap Anak Bungsu Perempuan (Analisis Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat)”* Persamaan dengan penelitian ini, yakni sama-sama mengkaji pembagian harta warisan pada anak bungsu. Penelitian tersebut memfokuskan pada pembagian warisan untuk anak bungsu perempuan, yang menerima bagian lebih banyak dari harta warisan, dan membandingkannya dengan ketentuan hukum waris Islam serta hukum adat setempat. Begitu pula, penelitian yang sedang diteliti juga bertujuan untuk mengkaji sikap anak

¹³ Yulia Maulidyanti, “Pembagian Warisan Lebih Besar Untuk Anak Sulung Di Kelurahan Sragi, Kabupaten Pekalongan” (UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2022).

bungsu dalam menuntut pembagian harta warisan lebih banyak, namun dengan perbedaan bahwa penelitian Anda tidak membatasi hanya pada anak bungsu perempuan, melainkan mencakup anak bungsu secara umum, baik laki-laki maupun perempuan. Perbedaannya terletak pada fokus dan pendekatan hukum yang digunakan. Penelitian Andi lebih menekankan pada perbedaan pembagian warisan antara anak laki-laki dan perempuan di dalam masyarakat Suku Bugis.

Sedangkan penelitian yang sedang diteliti lebih mengarah pada alasan yang melatarbelakangi sikap anak bungsu dalam menuntut pembagian harta warisan yang lebih banyak dan bagaimana hal itu dipandang dalam perspektif hukum Islam. Selain itu, penelitian Andi menggunakan dua pendekatan, yaitu hukum Islam dan hukum adat, sementara penelitian yang sedang diteliti lebih fokus pada tinjauan hukum Islam secara spesifik terkait dengan kewarisan dalam Al-Qur'an dan hadits.¹⁴

¹⁴ Andi Nur Fadini Putri, “*Praktik Pembagian Waris Masyarakat Suku Bugis Kabupaten Sidrap Terhadap Anak Bungsu Perempuan (Analisis Hukum Islam Dan Hukum Adat)*”, Skripsi, (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024).